

PARLEMENTARIA

Mengukir Asa Sekolah Rakyat



KETUA
TNI Harus Setia
Jaga Kedaulatan Negara

KORPOLKAM
Dorong Bentuk Badan
Nasional Penyelesaian
Reforma Agraria

Nomor 1365/III/X/2025 Oktober 2025



9 772614 339005



Mengukir Asa Sekolah Rakyat



FOTO: OJI/UM

Anggota Komisi VIII DPR RI M Mohammad Iqbal Romzi meninjau kegiatan praktek Siswa Sekolah Rakyat Palembang, Minggu (5/10/2025)

Pagi yang hangat menyelimuti langit Palembang saat dua mobil putih berhenti di halaman Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 7 Palembang. Dari kejauhan, suara riuh rebana menggema menyambut rombongan Komisi VIII DPR RI yang tengah melakukan kunjungan kerja reses. Beberapa siswi berbalut busana adat Palembang tampak tersenyum sambil mengalungkan selendang warna-warni kepada para tamu, menjadi sebuah sambutan sederhana namun penuh makna dari anak-anak yang tengah menjemput masa depan melalui pendidikan.

Bagi Mohammad Iqbal Romzi, Anggota Komisi VIII DPR RI, suasana pagi itu lebih dari sekadar seremoni penyambutan. Ia melihat potret kecil perjuangan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tengah menata harapan di tengah keterbatasan. “Walaupun sarana dan prasarana masih terbatas, sekolah rakyat harus tetap berkualitas. Negara harus hadir memberikan perhatian penuh

kepada masyarakat miskin ekstrem agar memperoleh pendidikan yang layak,” ujarnya dengan nada tegas namun hangat, di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (5/10).

Sekolah Rakyat Palembang, yang berasrama layaknya pesantren, telah berjalan tiga bulan. Dalam waktu singkat itu, banyak cerita yang muncul—tentang adaptasi, perjuangan, hingga perubahan karakter para siswa. Dari penuturan kepala sekolah, masa awal orientasi menjadi ujian tersendiri bagi sebagian siswa. “Ada yang demam, bahkan ada yang tidak betah di asrama karena

belum terbiasa. Namun kini, mereka mulai menikmati rutinitas belajar dan hidup mandiri,” kata Iqbal menirukan penjelasan pihak sekolah.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai bahwa proses adaptasi tiga bulan pertama justru menjadi fase penting dalam membentuk kedisiplinan dan kemandirian anak-anak. Dari wajah mereka yang cerah, ia melihat semangat baru—sebuah tanda bahwa pendidikan benar-benar mampu menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. “Selama tiga bulan, karakter mereka mulai terbentuk. Mereka lebih percaya diri dan ceria. Ini bukti bahwa Sekolah Rakyat bisa menjadi miniatur pengentasan kemiskinan,” tuturnya penuh keyakinan.

Kunjungan tersebut juga menjadi refleksi bagi Komisi VIII DPR RI untuk terus memperkuat peran lembaga pendidikan nonformal seperti Sekolah Rakyat. Dengan pendekatan berasrama, lembaga ini tak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga nilai hidup, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, ruang belajar ini bukan sekadar sekolah—melainkan rumah kedua yang memberi arah dan asa. **oji/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Setia Jaga Kedaulatan Negara



FOTO: IKA/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan bahwa keberadaan TNI merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan rakyat hidup dalam rasa aman, damai, dan bermartabat.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah benteng pertahanan bangsa yang selalu setia menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” kata Puan di Jakarta, Minggu (4/10).

Puan menyebut bahwa delapan dekade pengabdian TNI mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam membangun pertahanan yang lahir dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. “Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari kompetisi geopolitik, ancaman keamanan non-tradisional, hingga disrupsi teknologi dan informasi, peran TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya. **rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analists Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danurirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval, Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Purnto Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysis, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri, Mario Fernandez

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mullia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Insan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email: bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Dorong Bentuk Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR mempercepat penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut-larut.

“(DPR menerima) teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria, dalam memperjuangkan agraria memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama, yang belum terselesaikan. Nah sehingga

Nasional Reforma Agraria di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Dasco menerangkan kehadiran Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria diharapkan mampu menjadi solusi konkret menuntaskan persoalan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat kecil. Hal itu ditegaskan Dasco sesuai semangat Presiden Prabowo Subianto, yakni menutup permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua



FOTO: MUN/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Sebagai tindak lanjut, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tersebut menerangkan melalui Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Reforma Agraria telah bersepakat untuk mendorong Pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria.

kemudian, selain memang DPR itu sudah membentuk Pansus penyelesaian reforma agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong Pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian reformasi agraria,” ujar Dasco usai menerima audiensi Koalisi

Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto serta Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Kehadiran Pimpinan DPR dan Komisi IV menegaskan keseriusan lembaga legislatif dalam mengawal agenda reforma agraria yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. **pun/rdn**



Tidak Boleh Ada Pemotongan Dana PIP



FOTO: DOK/ANA

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan di daerah pilihannya Jawa Barat VII. Dalam kegiatan reses yang digelar di Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada akhir pekan ini, Saan menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 155 siswa SDN Cinangka.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sapa warga ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat setempat. Dalam suasana penuh kehangatan, Saan menyerahkan

bantuan PIP secara simbolis kepada para siswa yang didampingi orang tua dan guru. Selain itu, ia turut membagikan perlengkapan alat tulis untuk mendukung semangat belajar anak-anak.

Keceriaan tampak terpancar dari wajah para siswa, yang menyambut bantuan tersebut dengan antusias dan penuh rasa syukur. Ia menjelaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Ia meyakini bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak, tanpa terbebani oleh kondisi ekonomi keluarga.

"Pendidikan adalah salah satu hal yang dapat mengubah hidup

seseorang menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, anak-anak kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki masa depan mereka dan mengangkat derajat keluarga," ujar Saan di hadapan para guru, siswa, dan warga yang hadir, di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (11/10).

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan PIP tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun, karena dana tersebut merupakan hak penuh bagi para penerima manfaat. Ia menilai, program ini adalah salah satu bentuk nyata perhatian negara terhadap pemerataan akses pendidikan. **eno/rdn**



Jangan Ragu Sikat Ormas Preman

Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, meminta TNI tidak usah ragu-ragu menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat. Apalagi, tegasnya, ormas tersebut bertindak bak preman, merasa berkuasa dan aman karena diduga terafiliasi partai politik.

Hal ini disampaikannya saat Rapat dengan jajaran Kodam III Siliwangi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai Politisi Fraksi Partai Partai Gerindra, ia menyatakan bahwa partainya tidak pernah membenarkan perilaku premanisme.

“Di sini mau saya sampaikan, Pak. Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau

mereka ngaku begitu silakan ditindak. Bahkan kalau ada

Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak dan TNI adalah yang paling dipercaya oleh masyarakat jadi silakan ditindak

unsur resmi dari partai kami berkelakuan preman, hantam juga,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/10).

Masyarakat, katanya, tidak boleh hidup dalam ketakutan. Maka dari itu, TNI sebagai instansi yang terus mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi harus mampu hadir memberikan keamanan dan mengeliminasi berbagai gangguan ketertiban di tengah masyarakat.

Aksi premanisme berbalut ormas kerap terjadi di Indonesia. Akibat aksi itu, tidak jarang masyarakat jadi khawatir dalam melaksanakan aktivitasnya. “Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak dan TNI adalah yang paling dipercaya oleh masyarakat jadi silakan ditindak,” ucap Sabam.

Preman berkedok ormas ini juga menjadi perhatian dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia bahkan menyebut kalau aksi mereka kerap menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi karena mengganggu iklim usaha di Indonesia. Salah satu contoh, beberapa waktu lalu sebuah pabrik mobil kenamaan dari Cina batal mendirikan pabriknya di Subang. Negara ditaksir rugi triliunan akibat kejadian tersebut.

— **ndn/rdn**

Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kota Bandung.



FOTO: NDN/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya

BPD DIY Perlu Agresif Perkuat Sektor Riil



Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha saat melakukan kunjungan kerja ke BPD DIY, Yogyakarta, DIY, Jumat (3/10/2025).

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup baik dalam menjaga kualitas kredit. Meskipun demikian, ia menegaskan BPD DIY perlu lebih agresif dalam mendorong pembiayaan sektor riil.

“Dari laporan direksi, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di BPD DIY sekitar 3 persen. Itu masih dalam kategori wajar, bahkan di bawah rata-rata nasional. Yang menggembirakan, BPD DIY sudah mampu menyalurkan kredit ke UMKM dan bekerja sama dengan pelaku usaha di daerah. Ini

langkah baik untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” ungkap Toha kepada *Parlementaria* usai melakukan kunjungan kerja ke BPD DIY, Yogyakarta, DIY, Jumat (3/10).

Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menggulirkan dana Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempercepat perputaran uang di sektor riil. Menurutnya, hal serupa juga seharusnya diikuti oleh bank-bank daerah, termasuk BPD DIY.

“Kalau kredit perumahan (KPR) misalnya dipermudah, dampaknya akan luas. Ada tukang yang bekerja, material bangunan terbeli, transportasi bergerak, hingga warung makan pun ikut laku.

Intinya, sektor riil akan berjalan dan ekonomi rakyat ikut tumbuh. Itu yang diharapkan pemerintah,” jelasnya.

Lebih jauh, Toha mengapresiasi inovasi BPD DIY yang kini tidak hanya bergantung pada dana APBD, melainkan lebih kreatif menghimpun dana masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan BPD dalam mengoptimalkan peran pembiayaan daerah juga akan berkontribusi langsung pada pendapatan asli daerah (PAD).

“Dulu mayoritas dana BPD bersumber dari transfer APBD, DAU, atau DAK. Tapi sekarang justru dana masyarakat yang lebih besar masuk. Ini menunjukkan BPD sudah mulai mandiri dan dipercaya publik,” tegasnya. **ais/rdn**



Sinkronkan Qanun Syariah Aceh dalam Revisi KUHAP



FOTO: EKO/PDT

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Aceh.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan pentingnya memperhatikan kekhususan Aceh dalam proses pembaruan hukum nasional, khususnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini ia sampaikan saat kegiatan kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Aceh bersama para mitra kerja di bidang hukum, seperti Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Aceh, Senin (6/10).

Menurut Nasir, posisi Aceh sebagai daerah yang memiliki status khusus dan istimewa menuntut adanya harmonisasi antara hukum nasional dan peraturan daerah

berbasis syariah, atau yang di Aceh dikenal dengan sebutan *qanun*. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah *Qanun Jinayat*, yang mengatur aspek hukum pidana syariah di Aceh.

"Aceh ini salah satu provinsi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah karena statusnya sebagai daerah khusus dan istimewa. Oleh karena itu, masukan yang paling penting adalah bagaimana perubahan KUHAP nantinya dapat mengakomodasi qanun-qanun lokal, terutama *Qanun Jinayat*," ujar Nasir kepada *Parlementaria*.

Ia menekankan, tujuan dari pembaruan hukum nasional tidak hanya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, tetapi juga memastikan aturan lokal seperti hukum syariah di Aceh tetap sejalan

Posisi Aceh sebagai daerah yang memiliki status khusus dan istimewa menuntut adanya harmonisasi antara hukum nasional dan peraturan daerah berbasis syariah

dengan semangat hukum nasional. "Pembaruan hukum nasional melalui perubahan hukum acara pidana itu tidak boleh mengabaikan aturan-aturan syariah yang sudah berlaku di Aceh. Ini penting agar semangat penegakan hukum di daerah tetap harmonis dengan sistem nasional," lanjut Politisi Fraksi PKS ini. — **ssb/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Tegur Bulog Beli Gabah Tanpa Pertimbangkan Kualitas

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menilai penugasan

khusus kepada Perum Bulog untuk membeli gabah tanpa mempertimbangkan kualitas (*at any quality*), malah akan menimbulkan risiko serius terhadap mutu beras hasil olahan. "Bahan bakunya bermasalah, kemudian disimpan dalam jumlah jauh melebihi kapasitas gudang yang dimiliki. Kekacauannya makin sempurna, seiring tata kelolanya yang tak kunjung dibenahi," katanya dikutip **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (9/10).

Belum lama ini, Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu menanggapi temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang melaporkan adanya 29.990 ton beras Bulog mengalami penurunan mutu, serta 1,45 juta ton beras lainnya telah disimpan lebih dari enam bulan. Data tersebut merupakan hasil tindak lanjut inspeksi mendadak Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, pada 23 September 2025 di gudang Bulog Ternate, Maluku Utara, yang menemukan sekitar 1.200 ton beras turun mutu.

Panitia Kerja (Panja) ini dibentuk oleh Komisi IV DPR RI untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan penyerapan gabah dan jagung dari petani. Tujuannya memastikan kebijakan

pemerintah, termasuk Inpres, berjalan di lapangan seperti yang diharapkan, yaitu petani menerima harga yang layak, penyerapan

Bahan bakunya bermasalah, kemudian disimpan dalam jumlah jauh melebihi kapasitas gudang yang dimiliki. Kekacauannya makin sempurna, seiring tata kelolanya yang tak kunjung dibenahi

hasil panen optimal, dan stabilitas pangan nasional terjaga.

Alex mengingatkan agar penugasan Bulog pada Semester II/2025 untuk kembali menyerap gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per kilogram, tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di Semester I. Pada semester sebelumnya, menurut Alex, Bulog hanya mendapat mandat menyerap sekitar 10 persen dari total hasil panen petani. — **hal/rdn**

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman.



FOTO: QJI/PDT

Tiga Juta Rumah Jadi Faktor Keberhasilan Ekonomi

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan nasional masih mencapai 9,9 juta unit. Artinya, hampir 10 juta rumah tangga di

Program ini merupakan upaya nyata kehadiran negara untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda.

Indonesia tidak memiliki hunian milik sendiri. Angka ini bisa jauh lebih besar jika memperhitungkan pertumbuhan jumlah keluarga baru dan kelayakan tempat tinggal hingga 2025.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pun meresponnya melalui peluncuran Program 3 Juta Rumah. Program ini merupakan upaya nyata kehadiran negara untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebab itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyambut baik program 3 juta rumah yang dilakukan oleh pemerintah. Terlebih saat ini, jelasnya, pasar perumahan di Indonesia terus-menerus menunjukkan tren kenaikan harga yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya harga tanah yang terus naik, kenaikan biaya material dan infrastruktur, inflasi dan suku bunga KPR serta tingginya permintaan tetapi pasokan terbatas.

Kombinasi beberapa faktor tersebut membuat harga hunian yang layak semakin tidak terjangkau. "Disampaikan pemerintah bahwa *backlog* mencapai 9,9 juta unit itu disebelah mana harus jelas, kemudian kualitas tanah dan bangunannya juga harus diperhatikan jangan sampai kondisinya tidak sesuai," tuturnya dalam agenda dialetika demokrasi dengan tema "Program 3 Juta Rumah Wujud Nyata Pemerintah Dalam Menjawab Kebutuhan Dasar Masyarakat", di Ruang PPIP, Gedung DPR, Kamis (9/10).

Ketepatan sasaran juga tak kalah penting. Ia menyampaikan bahwa kerja sama dengan BPS perlu dilakukan untuk akurasi data. Oleh karena itu, tegasnya, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional digunakan untuk menentukan kategori penerima bantuan apakah masuk dalam kategori tidak punya rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni. **tn/aha**



FOTO: OJI/VEL

Optimalisasi PSN dan UMKM di Sulsel

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, memimpin kunjungan kerja reses ke Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (3/10). Kunjungan tersebut dalam rangka memantau pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Strategis Nasional (PSN) dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Husein menegaskan pentingnya pengawasan dan supervisi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Yang menjadi kunci utama di sini adalah bagaimana kita melakukan supervisi secara konsisten. Karena program baru tidak bisa serta-merta langsung sukses, tapi harus melalui tahapan dan proses yang diawasi dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas nasional seperti KDKMP (Kredit untuk Dunia Kerja, Mahasiswa, dan

Yang menjadi kunci utama di sini adalah bagaimana kita melakukan supervisi secara konsisten. Karena program baru tidak bisa serta-merta langsung sukses, tapi harus melalui tahapan dan proses yang diawasi dengan baik

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, saat memimpin kunjungan kerja reses ke Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (3/10/2025).

Pelaku Usaha Produktif) serta MBG yang dinilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Husein turut menyinggung proyek Makassar New Port sebagai salah satu fokus pengawasan Komisi VI di wilayah Sulawesi Selatan.

Terkait pemberdayaan UMKM, Husein mendorong agar pelaku usaha tidak hanya bergantung pada proyek dan bantuan pemerintah, tetapi juga mampu membuka pasar secara mandiri. Ia menambahkan, penguatan akses pasar, baik domestik maupun regional, harus menjadi fokus utama agar UMKM dapat naik kelas.

“Yang terpenting ke depan adalah kualitas. Kita dorong terus agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota ikut membantu mengawasi dan mendukung keberhasilan program ini,” pungkasnya. — mro/rdn



Perlu *Role Model* Desa Wisata Berkelanjutan



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Kota Tomohon, Sulawesi Utara.

Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan desa wisata sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Kota Tomohon, Sulawesi Utara.

“Undang-Undang Kepariwisata telah memberikan arah baru dalam pengembangan pariwisata nasional, termasuk dengan skenario besar klasifikasi desa wisata, yaitu rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Di Tomohon ini, kami melihat langsung desa wisata rintisan yang diharapkan bisa menjadi contoh pengembangan berkelanjutan,” ujar Lamhot di Kantor Wali Kota

Tomohon memiliki keunggulan wisata alam, wisata bunga, serta destinasi budaya yang sangat potensial. Jika dikembangkan dengan baik, Tomohon bisa menjadi ikon baru pariwisata Sulawesi Utara

Tomohon, Sulawesi Utara, Jumat (3/9).

Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 6.400 desa wisata di seluruh Indonesia. Dengan dukungan regulasi baru, desa wisata diharapkan menjadi tulang

punggung ekonomi berbasis desa. “Tomohon memiliki keunggulan wisata alam, wisata bunga, serta destinasi budaya yang sangat potensial. Jika dikembangkan dengan baik, Tomohon bisa menjadi ikon baru pariwisata Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Meski demikian, Lamhot mengakui sejumlah kendala masih membayangi sektor pariwisata, terutama pada aksesibilitas. Ia mencontohkan, ketika terdapat lima penerbangan langsung internasional ke Sulawesi Utara, jumlah wisatawan mancanegara meningkat hingga 24,6 persen. “Konektivitas adalah kunci. Pembangunan infrastruktur dasar menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di berbagai provinsi lain,” jelasnya. pun/rdn



Perkuat Industri Halal Lewat Kolaborasi Pusat-Daerah

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor, mendorong penguatan sektor industri halal di Kalimantan Selatan sebagai salah satu langkah strategis pengembangan ekonomi berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal. Hal ini disampaikan Sudian Noor saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Minggu (6/10).

Ia juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk kawasan institusi halal di Kalimantan Selatan, khususnya

di wilayah Kalimantan Kelantan. Menurutnya, potensi ekonomi halal di daerah ini sangat besar, namun belum seluruhnya tergarap secara optimal.

“Kita ingin menampakkan arah yang jelas terhadap pengembangan industri halal. Karena sesungguhnya banyak kegiatan dan produk di Kalimantan Kelantan ini sudah halal, hanya belum tampak, belum terkatankan. Halal tapi tersembunyi,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberadaan kawasan halal bukan hanya simbol keagamaan, melainkan juga pendorong pertumbuhan ekonomi dan

peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, ia mengajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun kawasan halal yang dapat menjadi percontohan di tingkat nasional maupun Asia.

“Kita berharap, Kalimantan Kelantan memiliki simbol halal yang kuat dan bisa menjadi salah satu kawasan industri halal terbaik di Asia. Karena sekarang, banyak pihak yang mulai menyadari bahwa yang kalah dengan halal itu bukan hanya soal label, tapi soal nilai tambah dan kepercayaan masyarakat,” tambahnya. — gys/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor, dalam pertemuan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur di Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

Dukung Pemerintah Biayai Magang Nasional *Fresh Graduate*

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong generasi muda Indonesia untuk memanfaatkan program Magang Nasional untuk *fresh graduate* yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi pengangguran dan memperkuat keterampilan lulusan baru agar siap bersaing di dunia kerja.

“Ada program pemagangan nasional dari pemerintah pusat yang harus dimanfaatkan karena dibiayai sebesar Rp198 miliar. Program ini dapat diikuti oleh generasi muda, lulusan S1 dan D3, untuk menambah pengalaman kerja dan meningkatkan kompetensi,”

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (6/10/2025).

ujar Yahya saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (6/10).

Kemnaker diketahui akan membuka pendaftaran program magang nasional bagi lulusan baru (*fresh graduate*) mulai 7 Oktober 2025. Peserta magang akan memperoleh gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama

masa magang yang berlangsung enam bulan, terbagi dalam dua periode: Oktober–Desember 2025 dan Januari–Maret 2026.

Sebanyak 553 perusahaan BUMN dan swasta telah terdaftar sebagai penyelenggara program ini, yang memberikan kesempatan magang di berbagai sektor industri. Yahya menilai, langkah Kemnaker ini sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran terbuka, khususnya di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Ia menegaskan pengalaman kerja menjadi faktor penting agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan dan wawasan industri yang dibutuhkan dunia kerja. “Program ini adalah momentum berharga bagi anak muda Indonesia untuk menyiapkan diri sebelum benar-benar masuk ke dunia kerja. Dengan dukungan dana dari pemerintah, saya harap partisipasi generasi muda bisa maksimal,” tegas legislator asal Fraksi Partai Golkar tersebut.

gal/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

FOTO: GAL/PDT



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyerahkan simbolis bantuan KIP Kuliah kepada Claudia, penerima manfaat di Dendengan Luar, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (5/10/2025).

Masa Depan Pendidikan Indonesia di Sulawesi

Suara tawa kecil memecah keheningan sore di sebuah rumah sederhana di kawasan Dendengan Luar, Manado, Sulawesi Utara. Di ruang tamu yang penuh kehangatan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, berbincang akrab dengan dua gadis muda penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Cinta dan Claudia. Sesekali, Esti tersenyum sembari menatap keduanya dengan pandangan bangga, seolah melihat secercah masa depan bangsa yang tengah berjuang menembus batas ekonomi.

Kunjungan kerja reses Komisi X pada Minggu (5/10) itu tak sekadar agenda formal. Lebih dari

itu, ia datang untuk memastikan bahwa semangat belajar anak-anak penerima KIP Kuliah benar-benar mendapat tempat, dan bahwa bantuan negara sampai kepada mereka yang sungguh membutuhkan.

“Kita punya harapan besar kepada pemerintah agar KIP Kuliah ini benar-benar tepat sasaran dan menjadi dukungan nyata bagi anak-anak kita yang punya semangat kuliah, tetapi terbentur keterbatasan biaya,” ujarnya kepada **Parlementaria**.

Esti menganggap Cinta dan Claudia bukan sekadar penerima manfaat, melainkan simbol harapan bagi masa depan bangsa. “Claudia ini adalah harapan kita ke depan, juga harapan keluarganya.

Kami yakin, Claudia akan jadi anak hebat yang bersungguh-sungguh mengejar cita-citanya,” tutur politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu dengan nada penuh empati.

Bagi Esti, keberhasilan program KIP Kuliah tidak cukup diukur dari angka penerima atau serapan anggaran, melainkan dari seberapa besar pengaruhnya dalam mengubah hidup penerima dan keluarganya. Karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi langsung di lapangan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. “Dengan melihat langsung kondisi keluarga Claudia, saya kira tidak ada keraguan bahwa bantuan ini sangat tepat sasaran,” tegasnya.

uf/rdn



Subsidi Listrik Harus Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati yang Mampu



FOTO: TS/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi saat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke PT PLN UP3 Surakarta di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi listrik yang disalurkan melalui PLN. Ia menekankan subsidi harus benar-benar melindungi masyarakat kecil, bukan justru dinikmati oleh kelompok mampu.

“Subsidi ini hadir karena ada masyarakat yang tidak mampu membeli listrik dengan harga dasar PLN. Tapi jangan sampai orang yang mampu justru ikut menikmati. Subsidi harus berkeadilan, tepat

sasaran, dan hanya untuk yang benar-benar membutuhkan,” ujar Didik kepada **Parlementaria** usai agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke PT PLN UP3 Surakarta di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (3/10).

Diketahui, beban subsidi energi dan non-energi sendiri semakin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, angkanya mendekati 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2024, alokasi subsidi listrik yang disalurkan melalui PLN ditetapkan sebesar Rp75,83 triliun, terdiri atas Rp73,24 triliun

untuk subsidi berjalan ditambah kurang bayar Rp2,58 triliun dari tahun sebelumnya. Realisasi hingga akhir tahun mencapai sekitar Rp77,05 triliun.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan mayoritas subsidi listrik tersebut dinikmati oleh rumah tangga kecil, khususnya pelanggan 450 VA dan 900 VA, yang jumlahnya mencapai 35,2 juta pelanggan. Dari total subsidi, sekitar 67 persen terserap oleh kelompok rumah tangga ini. Per Mei 2025 saja, subsidi listrik yang telah tersalur mencapai Rp34,6 triliun dengan volume 31,17 TWh. [um/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Revolusi Kilang Pertamina, Bukan Sekadar Parsial

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menyoroti serius insiden kebakaran yang kembali terjadi di Kilang Pertamina RU II Dumai. Ia menegaskan bahwa Pertamina harus melakukan pembenahan total agar kasus serupa tidak lagi terulang di masa mendatang.

“Pertamina harus sangat berbenah. Kebakaran kilang tidak boleh lagi dianggap sebagai hal yang biasa. Ini persoalan serius yang menyangkut keselamatan, keamanan energi nasional, dan kepercayaan publik. Harus dihentikan selamanya,” tegas Jalal dalam keterangan tertulisnya kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Minggu (5/10).

Menurut Haji Jalal, kejadian berulang ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan dan penerapan SOP. Ia menilai perlu adanya revolusi sistem keselamatan, bukan sekadar perbaikan parsial.

“SOP dan sistem otomatis pengamanan kilang harus sangat dikuatkan dan ditingkatkan. Pertamina harus memiliki sistem deteksi dini dan pemadam otomatis yang bekerja cepat dan akurat. Tidak boleh lagi bergantung pada reaksi manual yang lambat,” lanjutnya.

Ini persoalan serius yang menyangkut keselamatan, keamanan energi nasional, dan kepercayaan publik. Harus dihentikan selamanya

Karena itu, ia memaparkan sejumlah langkah konkret yang perlu segera dilakukan Pertamina, *pertama*, audit menyeluruh SOP operasional dan keselamatan di seluruh kilang minyak. *Kedua*, penerapan sistem otomatis untuk deteksi kebocoran, kebakaran, dan *shutdown* darurat. *Ketiga*, latihan rutin dan simulasi insiden agar seluruh personel tanggap terhadap potensi bahaya.

Keempat, transparansi dan akuntabilitas jika terjadi pelanggaran atau kelalaian. *Kelima*, kolaborasi dengan lembaga pengawas independen dan aparat keselamatan nasional. Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya keselamatan (*safety culture*) di lingkungan kerja Pertamina. — **rdn**

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir.



Perlindungan HAM Harus Jadi Prioritas Komite Reformasi Polri

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menanggapi rencana Presiden

Prabowo Subianto melantik Komite Reformasi Polri untuk memperkuat institusi kepolisian di Indonesia. Andreas berpandangan reformasi Polri harus menitikberatkan kepada

perlindungan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan akuntabilitas publik.

“Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, terlindungi secara nyata,” kata Andreas dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Senin (6/10).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan dan melantik Komite Reformasi Polri pada pekan ini. Komite ini akan diisi oleh 9 orang yang dipilih Prabowo. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut salah satu tokoh yang sudah menyatakan kesediaan masuk komite adalah eks Menko Polhukam, Mahfud MD. Beberapa tokoh lainnya adalah mantan Kapolri, namun Prasetyo enggan mengungkap siapa tokoh yang dimaksud.

Menanggapi hal itu, Andreas menyambut baik keterlibatan sejumlah tokoh independen yang disebut masuk dalam Komite Reformasi Polri seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi harapan memperkuat kontrol eksternal terhadap Polri.

“Terutama dalam meninjau praktik operasional dan kebijakan internal yang berdampak pada hak-hak warga negara,” tutur Legislator dari Dapil NTT I itu.

Namun Andreas mengingatkan potensi risiko dari dualisme pengawasan, khususnya dengan hadirnya Tim Transformasi Reformasi Polri yang berisikan 52 perwira kepolisian, mulai dari pelindung sampai anggota. **rdn**

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira.



FOTO: RSB/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Serangan ke Gaza Khianati Komitmen Gencatan Senjata

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan udara yang kembali terjadi di Jalur Gaza pada Kamis, 9 Oktober 2025. Insiden ini terjadi setelah adanya kesepakatan bahwa Hamas dan Israel telah menyetujui rencana gencatan senjata yang dinegosiasi secara tidak langsung di Mesir. Padahal, gencatan senjata ini sebuah langkah yang dinilai sebagai titik terang menuju perdamaian dan stabilitas kawasan.

Berdasarkan laporan terbaru, pertukaran sandera dan tahanan Palestina dijadwalkan dilakukan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan diimplementasikan. Hamas menyebut bahwa warga Israel yang disandera akan ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh otoritas Israel.

Merespons hal ini, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap proses gencatan senjata dan mencerminkan sikap yang mengabaikan upaya diplomatik yang telah dilakukan berbagai pihak.

“Kami sangat

prihatin dengan terulangnya serangan di Gaza setelah adanya kesepakatan gencatan senjata. Tindakan ini jelas merusak kepercayaan yang sedang dibangun dan semakin memperburuk penderitaan rakyat sipil yang sudah terlalu lama menderita akibat konflik ini,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis

yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (9/10).

Sebab itu, Politisi Fraksi PKS ini mendorong komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat langkah diplomatik dan memastikan implementasi nyata dari gencatan senjata di lapangan. — rdn

Ketua BKSAP DPR RI,
Mardani Ali Sera.



FOTO: JKA/PDT



Temui Pegiat Literasi Serap Aspirasi RUU Perbukuan



FOTO: RNI/AHA

Dokumentasi Anggota DPR RI Willy Aditya.

Anggota DPR RI Willy Aditya menemui pegiat literasi untuk mendengarkan aspirasi. Dalam forum diskusi terbuka yang berlangsung di sebuah kafe literasi, Willy mendengarkan langsung beragam persoalan dari penulis, pengelola taman bacaan, pemilik toko buku kecil, dan aktivis mahasiswa.

Pertemuan ini digelar di Kafe literasi Steva di Kota Padang, Sumatera Barat. Pertemuan ini diinisiasi Willy sebagai bagian dari proses penyusunan Revisi UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Adapun RUU Sistem Perbukuan merupakan usulan inisiatif pribadi Willy Aditya selaku legislator atau Anggota DPR.

“Pertemuan ini dalam rangka

meaningful participation, diskusi (dalam rangka) Belanja Masalah, untuk Rancangan Undang-undang Perbukuan yang merupakan usul inisiatif pribadi saya sebagai anggota DPR,” kata Ketua Komisi XIII itu dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Senin (6/20).

Dalam diskusi itu, para peserta menyampaikan sejumlah hal krusial, mulai dari sulitnya buku karya penulis lokal ditemukan di daerah sendiri, minimnya anggaran untuk taman bacaan masyarakat hingga ketimpangan akses pasar antara penerbit besar dan toko buku kecil.

Beberapa penulis pun mengusulkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membeli buku yang

kemudian ditaruh di perpustakaan-perpustakaan daerah. Ada pula sorotan terhadap praktik penyitaan buku oleh aparat, yang dinilai mengancam kebebasan literasi. Mereka berharap RUU Perbukuan juga mengatur hal ini.

Willy pun mencatat seluruh masukan yang disampaikan dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan parlemen untuk mendorong pengesahan RUU ini. “Teman-teman harus tahu, ini adalah inisiatif pribadi saya. Dan DPR itu tidak monolitik, ada 580 orang, yang memiliki isi kepala berbeda-beda. Saya akan melakukan tugas saya memastikan fraksi-fraksi DPR lainnya mendukung RUU ini,” pungkas Legislator asal Dapil Jatim XI itu.

rdn



Green Genk Farming Dukung Swasembada Pangan

Anggota DPR RI Aqib Ardiansyah menghadiri peresmian Kelompok tani muda *Green Genk Farming* di Desa Grenggeng, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (4/10). Pembentukan kelompok ini, menurut Aqib merupakan langkah inovatif dari Pemerintah Desa Grenggeng untuk menarik minat generasi muda pada sektor pertanian modern.

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah itu menyatakan

apresiasi atas kreativitas dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan masyarakat Grenggeng. Ia optimis bahwa inovasi ini adalah cara luar biasa untuk mempercepat swasembada pangan.

“Ini adalah bentuk kreativitas anak muda yang luar biasa untuk akselerasi swasembada pangan,” ucap Aqib di Jakarta, Selasa (7/10) seraya mengatakan langkah ini sejalan dengan

visi Presiden Prabowo dalam memajukan sektor pangan nasional.

Karenanya, dalam pertemuan tersebut, Politisi Fraksi PAN ini berjanji bahwa DPR akan memberikan dukungan teknis dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten agar program seperti ini dapat ditiru di daerah lain.

“Kita ingin hal baik seperti ini bisa terus didukung dan dimasifkan di tingkat nasional,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa inisiatif ini akan dilaporkan kepada Menteri Desa PDTT untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah, juga memberikan apresiasi tinggi. Ia memuji Pemerintah Desa Grenggeng yang telah tepat sasaran memanfaatkan 20 persen dana desa untuk mendukung ketahanan pangan dan modernisasi pertanian. “Penggunaan dana desa di Grenggeng ini sudah tepat sasaran,” ujar Zaeni. — **rnrm/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota DPR RI Aqib Ardiansyah menghadiri peresmian Kelompok tani muda *Green Genk Farming* di Desa Grenggeng, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).

PIA DPR Gelar Sunatan Massal Bersama Pertamina



FOTO: ALMA/AHA

Foto bersama Pimpinan DPR RI dan Pengurus PIA DPR RI pada kegiatan sosial PIA DPR RI Dalam rangka memperingati HUT ke-80 DPR RI di Selasar Gedung Nusantara.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI menggelar kegiatan sosial berupa sunatan massal bagi anak-anak dari keluarga besar DPR RI. Kegiatan yang berlangsung di Selasar Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (9/10) ini terselenggara atas kerja sama antara PIA DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) melalui *Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Group*.

Sebanyak 100 anak mengikuti kegiatan sunatan massal tersebut.

Mereka merupakan anak-anak dari pegawai DPR RI, tenaga kebersihan, petugas pengamanan, hingga masyarakat sekitar kompleks parlemen. Kegiatan ini juga melibatkan sekitar 50 tenaga medis profesional dari IHC Group yang merupakan bagian dari Pertamina BUMN Holding Rumah Sakit.

Wakil Ketua PIA DPR RI, Raden Euis Handayani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial PIA DPR RI terhadap keluarga besar di lingkungan parlemen. Menurutnya, peringatan HUT DPR RI tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga sarana

untuk berbagi manfaat bagi sesama.

"Kami ingin perayaan HUT DPR RI tahun ini punya makna lebih, tidak hanya sekadar seremoni, tapi juga memberi dampak langsung bagi keluarga besar DPR dan masyarakat sekitar," ujar Euis.

Euis menambahkan, kegiatan ini menjadi langkah awal PIA DPR RI untuk menjadikan program sosial sebagai agenda tahunan. "Melalui kegiatan ini, kami berharap anak-anak bisa tumbuh sehat dan bahagia. Kami ingin semangat berbagi dan kebersamaan terus tumbuh di lingkungan DPR," lanjutnya.

bit/aha





Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendorong perusahaan-perusahaan energi untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) secara konsisten dan berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan saat melakukan agenda kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan energi di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (29/9/2025). Foto: Aha/Uu

Beranda Ami



SCAN ME



SAKSIKAN HANYA DI
[HTTPS://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID](https://tvrparlemen.dpr.go.id)

 **TVR PARLEMEN**